



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 77**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN BANYURESMI
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

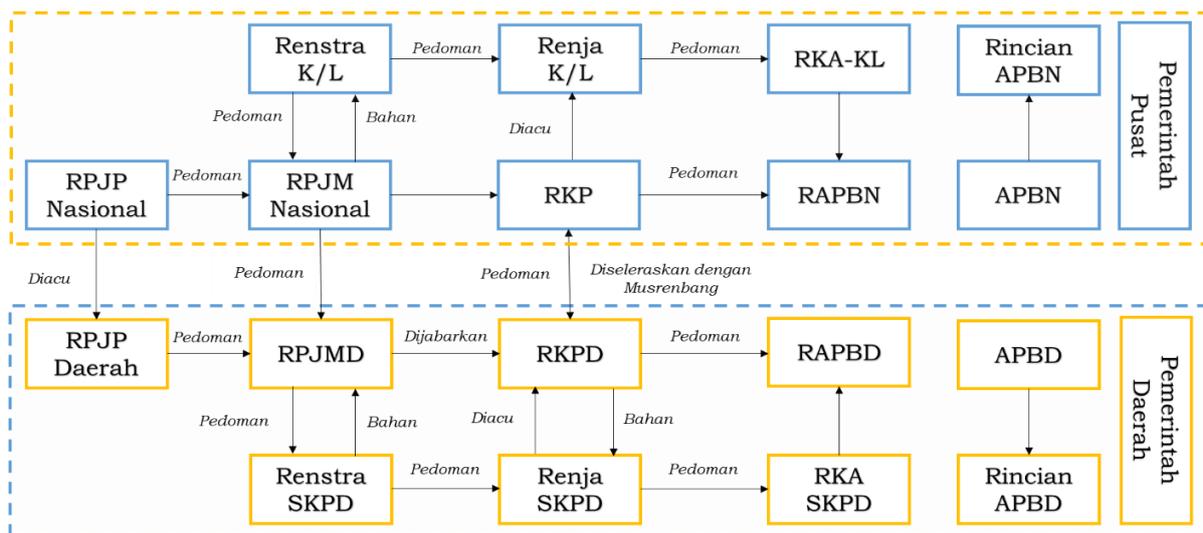
Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar.1.1

Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Renja Kecamatan Banyuresmi merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-Bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID 19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.

- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

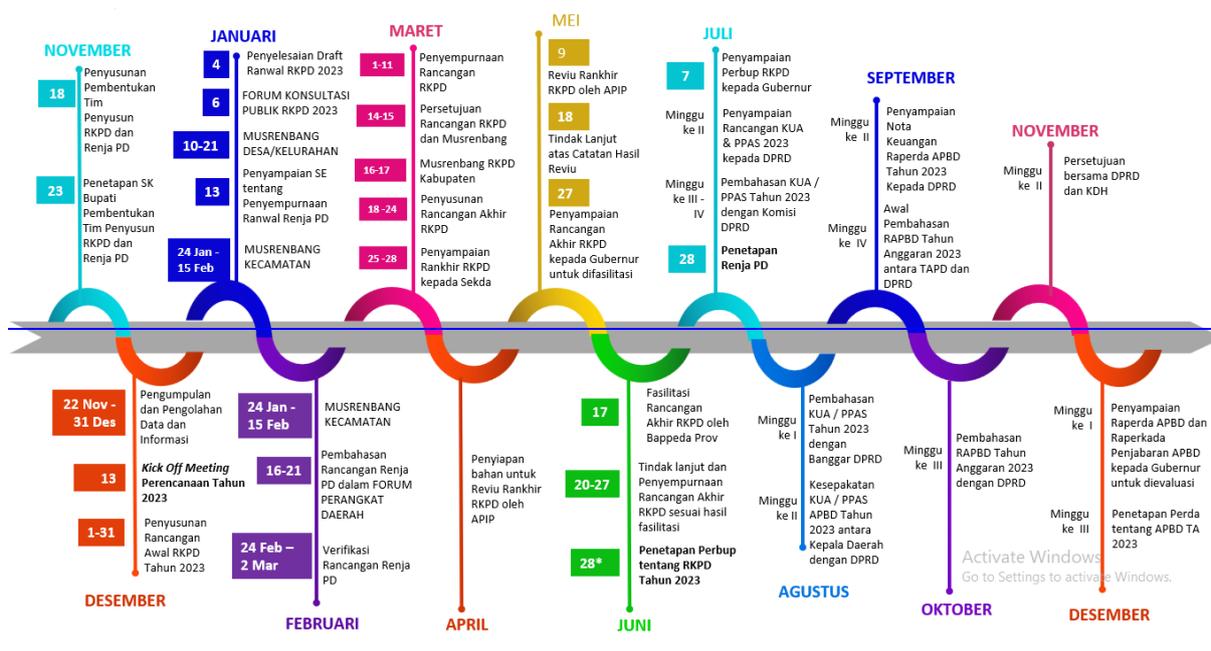
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“ peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam program dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusn dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023



Sumber : Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Banyuresmi tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).
31. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut;
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Renja SKPD;
35. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 tentang Renja SKPD Tahun 2021;
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyuresmi tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Banyuresmi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyuresmi tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Banyuresmi;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Banyuresmi sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyuwesmi Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyuwesmi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuwesmi selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banyuwesmi Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1)Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 2)Administrasi keuangan perangkat daerah;
- 3)Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- 4)Administrasi umum perangkat daerah;
- 5)Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 6)Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 7)Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :
 - 1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
 - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :
 - 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 12 Kegiatan terdapat 6 (enam) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan (1.30%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,08%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (89,22%)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (92.49%)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (96.72%)
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (77.96%)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99.23%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	416,668,500	409,962,300	98,39
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	229.301.300	222,595,100	97,08
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	229.301.300	222,595,100	97,08
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,222,091,295	3,989,706,502	94,49
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,077,523,384	1,853,695,504	89,22
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,063,438,984	1,839,611,104	89,15
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	161,589,660	149,458,100	92.49
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,559,860	65,519,044	91,55
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,872,773,431	1,872,579,650	96.72
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,872,773,431	1,872,579,650	96,72

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,995,740	36,048,024	77.96
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,010,920	4,072,104	67,74
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,990,000	49,606,508	99.23
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,740,000	20,379,000	98,25
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,150,000	24,127,500	99,90

Sumber : Evaluasi Renja tahun 2021

Adapun factor penghambat yang paling dominan atas ketidak tercapaiannya target kinerja yang terjadi di Kecamatan Banyuresmi adalah factor perubahan kondisi rill di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 12 Kegiatan terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan (98,70%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	416,668,500	409,962,300	98,39
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	187,367,200	187,367,200	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	187,367,200	187,367,200	100,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200,000,100	200,000,100	100,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200,000,100	200,000,100	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200,000,100	200,000,100	100,00
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	86,875,500	86,875,500	100,00
3	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,875,500	86,875,500	100,00
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86,875,500	86,875,500	100,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32,704,700	32,704,700	100,00
4	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32,704,700	32,704,700	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14,986,500	14,986,500	100,00

	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17,718,200	17,718,200	100,00
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,222,091,295	3,989,706,502	94,49
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,174,600	11,174,600	100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,174,600	11,174,600	100,00
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,077,523,384	1,853,695,504	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,084,400	14,084,400	100,00
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,053,400	11,053,400	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	11,053,400	11,053,400	100,00
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	161,589,660	149,458,100	92.49
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,090,900	6,090,900	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,119,100	6,119,100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,125,400	20,125,400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Sub Kegiatan Peraturan Perundang-undangan	4,874,400	4,874,400	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,960,000	24,960,000	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,860,000	27,860,000	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,995,740	36,048,024	77.96
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,630,000	7,630,000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,345,900	24,345,900	100,00
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,990,000	49,606,508	99.23
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,100,000	5,100,000	100,00

Sumber : Evaluasi Renja tahun 2021

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang

melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Kurangnya Pegawai sehingga anggaran tidak dapat di serap secara maksimal;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Banyuresmi pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Banyuresmi.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Banyuresmi merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Banyuresmi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

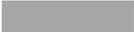
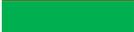
Adapun capaian Renstra Kecamatan Banyuresmi tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Banyuresmi
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	C	d	E	F	g	H	i	J	K
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	86,65	106,69	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	86,79	107,14	
						Kondisi Akhir (F)		86.72	107,06	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	CC	CC	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	

Sumber : Dokumen SKM dan Dokumen SAKIP Kecamatan Banyuresmi

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Banyuresmi tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Banyuresmi Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyuresmi

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7		Urusan Wajib											
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan											
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	n/a	100%	98.71%	98.71 %	100%	42.72	37.99		
7	01	02	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	n/a	100%	100%	100%	0%	24.08
7	01	02	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	n/a	100%	100%	100%	42.86	34.47
7	01	02	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	100%	n/a	100%	100%	100%	0%	22.25

7	01	02	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Umum	100%	n/a	100%	92.49%	92.49%	100%	49.50	29.08
7	01	02	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	100%	n/a	100%	96.72%	96.72%	100%	69.55	81.98
7	01	02	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	40.04	27.78
7	01	02	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	n/a	100%	99.23%	99.23%	100%	21.50	21.72
7	01	02	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	n/a	100%	98.39%	98.39%	100%	51.70	41.59
7	01	02	02	201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	n/a	100%	97.08%	97.08%	100%	50.00	50.90
7	01	02	01	202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.23	35.81
7	01	02	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.33	11.73

7	01	02	06	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.33	11.73
7	01	02	03		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	n/a	100%	99.31%	99.31%	100%	50.00	26.58
7	01	02	03	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	n/a	100%	99.31%	99.31%	100%	50.00	29.49
7	01	02	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	45.12	29.53
7	01	02	04	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	45.12	34.99

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2021 dan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Banyuresmi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	80,70	86,72	81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7,40	7,55	7,60	7,65	7,35	7,5	7,55	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	90	95	100	80	85	90	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	CC	B	CC	CC	CC	

Sumber : Dokumen LKPJ Kecamatan Banyuresmi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuresmi ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Banyuresmi memiliki hambatan yang menjadi penyebab tidak maksimalnya aktifitas roda pemerintahan di antaranya adalah keterbatasan sumberdaya aparatur kecamatan, sarana prasarana yang belum memadai, luasnya wilayah dan kultur atau karakteristik warga masyarakat yang berbeda-beda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Banyuresmi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Banyuresmi (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp. 6,718,605,508-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Banyuresmi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Banyuresmi mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Banyuresmi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Banyuresmi

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Banyuresmi		100%		UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Banyuresmi		100%		
7	1				KECAMATAN	Kecamatan Banyuresmi		100%	6,718,605,508	KECAMATAN	Kecamatan Banyuresmi		100%	7,053,035,788	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5,416,927,723	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5,416,927,723	
7	1	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11,733,330	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11,733,330	
7	1	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5,733,330	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5,733,330	
7	1	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1,000,000	
7	1	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	1,000,000	

7	1	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	1,000,000	
7	1	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	1,000,000	
7	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1,000,000	
7	1	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,000,000	
7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,282,581,455	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,282,581,455	
7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%	2,269,368,045	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%	2,269,368,045	
7	1	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	13,213,410	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	13,213,410	
7	1	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62,862,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62,862,500	
7	1	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Banyuresmi	jumlah paket pakaian	100%	12,862,500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Banyuresmi	jumlah paket pakaian	100%	12,862,500	
7	1	1	2:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Banyuresmi	jumlah pegawai	100%	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Banyuresmi	jumlah pegawai	100%	50,000,000	
7	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	198,129,908	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	198,129,908	

7	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah paket komponen listrik	100%	8,163,225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah paket komponen listrik	100%	8,163,225	
7	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah paket peralatan	100%	95,829,090	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah paket peralatan	100%	95,829,090	
7	1	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Banyuresmi	jumlah paket peralatan	100%	7,898,310	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Banyuresmi	jumlah paket peralatan	100%	7,898,310	
7	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	21,556,363	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	21,556,363	
7	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	4,840,920	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	4,840,920	
7	1	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	25,200,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	25,200,000	
7	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	33,642,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	33,642,000	
7	1	1	2:06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	1,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	1,000,000	
7	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,312,084,801	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,312,084,801	
7	1	1	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit kendaraan	100%	78,750,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit kendaraan	100%	78,750,000	
7	1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Unit mebel	100%	133,334,801	Pengadaan Mebel	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Unit mebel	100%	133,334,801	
7	1	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	jumlah unit peralatan	100%	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	jumlah unit peralatan	100%	100,000,000	
7	1	1	2:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit Gedung	100%	500,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit Gedung	100%	500,000,000	
7	1	1	2:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit sarpras	100%	500,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah unit sarpras	100%	500,000,000	
7	1	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kecamatan Banyuresmi	jumlah unit sarpras	100%	1,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kecamatan Banyuresmi	jumlah unit sarpras	100%	1,000,000,000	

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	407,867,140	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	407,867,140
7	1	2	2:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	204,994,750	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	204,994,750
7	1	2	2:01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100,000,000
7	1	2	2:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Kegiatan	100%	104,994,750	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Kegiatan	100%	104,994,750
7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100%	202,872,390	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100%	202,872,390
7	1	2	2:02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	49,480,515	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	49,480,515
7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	153,391,875	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	153,391,875
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	100%	244,945,955	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	100%	244,945,955

							Lembaga Kemasyarakatan				Lembaga Kemasyarakatan			
7	1	3	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	74,945,955	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	74,945,955
7	1	3	2:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banyuresmi	jumlah Lembaga	100%	15,432,900	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banyuresmi	jumlah lembaga	100%	15,432,900
7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	59,513,055	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	59,513,055
7	1	3	2:03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	110,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	110,000,000
7	1	3	2:03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	10,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan	100%	10,000,000
7	1	3	2:03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	jumlah laporan pengembangan UKM	100%	100,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	jumlah laporan pengembangan UKM	100%	100,000,000
7	1	3	2:05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah dokumen koordinasi	100%	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah dokumen koordinasi	100%	20,000,000
7	1	3	2:05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	10,000,000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	10,000,000
7	1	3	2:05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	10,000,000	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	10,000,000
7	1	3	2:06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah dokumen pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga	100%	40,000,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah dokumen pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga	100%	40,000,000

7	1	3	2:06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100%	5,000,000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100%	5,000,000
7	1	3	2:06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100%	5,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100%	5,000,000
7	1	3	2:06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	5,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	5,000,000
7	1	3	2:06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100%	5,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100%	5,000,000
7	1	3	2:06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100%	5,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100%	5,000,000
7	1	3	2:06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	5,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Banyuwesmi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan	100%	5,000,000

7	1	4	7:04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Koordinasi	100%	100,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Koordinasi	100%	100,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	269,902,605	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	269,902,605
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	269,902,605	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	269,902,605
7	1	5	2:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah peserta pembinaan	100%	7,402,500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah peserta pembinaan	100%	7,402,500
7	1	5	2:01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah peserta pembinaan	100%	52,500,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah peserta pembinaan	100%	55,125,000
7	1	5	2:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	210,000,105	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	220,500,110
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	156,468,140	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Banyuresmi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	160,291,547

7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	156,468,140	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	160,291,547
7	1	6	2:01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	20,000,000
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	43,433,040	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	45,604,692
7	1	6	2:01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	20,000,000
7	1	6	2:01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	17,602,200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	18,482,310
7	1	6	2:01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	15,432,900	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen	100%	16,204,545
7	1	6	2:01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	20,000,000
7	1	6	2:01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	20,000,000

Sumber : Rancangan Awal Renja SIPD Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Banyuresmi melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Banyuresmi mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyuresmi

No	Program/Kegiatan	Lokasi/Desa	Indikator Kinerja	Volume	Pagu	catatan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Sukamukti	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	10000	14,000,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Sukasenang	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	280	3,920,000,000	Setda

	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Banyuresmi	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	280	3,920,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
4	Meningkatnya pengamalan Nilai - nilai keagamaan dan budaya Daerah	Desa Banyuresmi	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat	1 paket	500,000,000	Setda
	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat					
5	Pengadaan Tanah dan Bangunan	Desa Banyuresmi	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	4200	4,200,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					

Sumber : Dokumen RPTK Kecamatan Banyuresmi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Banyuresmi mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7,60
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC

Sumber : *Reviu Rentra Kecamatan Banyuresmi*

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Banyuresmi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Banyuresmi sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan

di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Banyuresmi diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Banyuresmi merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Banyuresmi diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Banyuresmi. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banyuresmi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Banyuresmi sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti wisata situ Bagendit.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Banyuresmi melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Banyuresmi dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6,718,605,508,-.

Adapun Program Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Banyuresmi pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.3.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.3.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.3.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3.8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.3 Pemeliharaan Mebel
- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - 3.2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.3.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - 3.3.2 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - 3.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.4.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - 3.4.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - 3.4.3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

- 3.4.4 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 3.4.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - 3.4.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 3.4.7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 3.4.8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - 3.4.9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.5 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.6 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7																	
7	1										6,718,605,508						7,053,035,788
7	1	1									5,416,927,723						5,693,774,113
7	1	1	2:01								11,733,330						17,319,997
7	1	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen 58 CC	5,733,330	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12,319,997
7	1	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen 58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen 58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000

7	1	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000	
7	1	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0	
7	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000	
7	1	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000	
7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,282,581,455							2,396,710,528
7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	18 Orang/bulan	58 CC	2,269,368,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,382,836,447	
							jumlah pembayaran gaji dan tunjangan				12 Bulan								

7	1	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	13,213,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,874,081
7	1	1	2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									62,862,500			66,005,625	
7	1	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	jumlah paket pakaian	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	34 paket	58 CC	12,862,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	13,505,625
7	1	1	2:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	jumlah pegawai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	5 Orang	58 CC	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	52,500,000
7	1	1	2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									198,129,908			209,036,404	
7	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket komponen listrik	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	8 paket	58 CC	8,163,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,571,386
7	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	5 paket	58 CC	95,829,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100,620,545
7	1	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah paket peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	8 paket	58 CC	7,898,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,293,226
7	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Paket	58 CC	21,556,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23,684,181

7	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	12 Dokumen	58 CC	4,840,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,082,966
7	1	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26,460,000
7	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	33,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35,324,100
7	1	1	2:06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,312,084,801				2,427,689,041	
7	1	1	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	78,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	82,687,500
7	1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	133,334,801	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	140,001,541
7	1	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000

7	1	1	2:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000
7	1	1	2:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000
7	1	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,050,000,000
7	1	1	2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									51,424,779			53,996,020	
7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,230,000
7	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	8,011,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,412,075
7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	30,813,279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32,353,945
7	1	1	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									498,110,950			523,016,498	

7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	6 Unit	58 CC	21,777,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22,865,850
7	1	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	23,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,026,750
7	1	1	2:09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	5 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	52,498,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55,123,898
7	1	1	2:09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	210,000,000
7	1	1	2:09	11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						407,867,140		428,260,498				
7	1	2	2:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						204,994,750		215,244,488				
7	1	2	2:01	1	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	82	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	2	2:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	82	104,994,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	110,244,488
7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						202,872,390		213,016,010				
7	1	2	2:02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	82	49,480,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	51,954,541
7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	82	153,391,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	161,061,469

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							244,945,955		253,693,253			
7	1	3	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							74,945,955		78,693,253			
7	1	3	2:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah lembaga	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan	100 %	5 Lembaga	90%	15,432,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,204,545
7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90%	59,513,055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	62,488,708
7	1	3	2:03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							110,000,000		115,000,000			
7	1	3	2:03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2:03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah laporan pengembangan UKM	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	105,000,000
7	1	3	2:05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							20,000,000		20,000,000			
7	1	3	2:05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	90%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000

7	1	3	2:05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	90%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2:06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							40,000,000			40,000,000			
7	1	3	2:06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2:06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2:06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000

7	1	3	2:06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2:06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2:06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000

7	1	3	2:06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2:06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								222,493,945				233,618,642	
7	1	4	7:03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								122,493,945				128,618,642	
7	1	4	7:03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah laporan sub kegiatan	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	90,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	95,035,500
7	1	4	7:03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah laporan sub kegiatan	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	31,983,945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	33,583,142

7	1	4	7:04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						100,000,000					105,000,000		
7	1	4	7:04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	105,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						269,902,605					283,397,735		
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						269,902,605					283,397,735		
7	1	5	2:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	7,60	7,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	7,772,625

7	1	5	2:01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	7,60	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,125,000
7	1	5	2:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	210,000,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220,500,110
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							156,468,140			160,291,547		
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							156,468,140			160,291,547		
7	1	6	2:01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	43,433,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45,604,692
7	1	6	2:01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2:01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	17,602,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18,482,310

7	1	6	2:01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	15,432,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	16,204,545
7	1	6	2:01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2:01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
TOTAL													6,718,605,508				7,053,035,788	

Sumber : Rancangan Akhir Penyempurnaan Renja SIPD tahun 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sebesar Rp. **6,718,605,508,-** (Enam Milyar tujuh ratus delapan belas ribu enamratus lima ribu limaratus delapan), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5,416,927,723,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11,733,330,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2,282,581,455,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 62,862,500,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 198,129,908,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2,312,084,801,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 51,424,779,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air,

listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 498,110,950,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 407,867,140,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 204,994,750,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 202,872,390,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 244,945,955,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 74,945,955,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 110,000,000,-

Keluaran : Jumlah Lembaga yang dapat di berdayakan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 20,000,000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

3.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 40,000,000,-
- Keluaran : Jumlah Keluarga yang dapat di berdayakan
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 122,493,945,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 122.493.945,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100,000,000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 269,902,605,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 269,902,605,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 156,468,140,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 156,468,140,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Jumlah Dokumen RPTK
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,60

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banyuresmi

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 6.718.605.508,- (Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Banyuresmi. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya Program dan kegiatan untuk tahun 2023 kami sajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 4.1
Matriks Akhir Renja/Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Tar get				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN					6,718,605,508			7,053,035,788				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,416,927,723			5,693,774,113				
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11,733,330			17,319,997				
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	5,733,330	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12,319,997
7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000

7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0

7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,282,581,455				2,396,710,528
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	18 Orang/bulan	58 CC	2,269,368,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,382,836,447
						jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit		12 Bulan							

7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	13,213,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,874,081
7	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									62,862,500	66,005,625			
7	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	jumlah paket pakaian	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	34 paket	58 CC	12,862,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	13,505,625
7	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	jumlah pegawai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	5 Orang	58 CC	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	52,500,000
7	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah									198,129,908	209,036,404			
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket komponen listrik	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	8 paket	58 CC	8,163,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,571,386

7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	5 paket	58 CC	95,829,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100,620,545
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah paket peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	8 paket	58 CC	7,898,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,293,226
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Paket	58 CC	21,556,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23,684,181
7	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	12 Dokumen	58 CC	4,840,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,082,966

7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26,460,000
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	33,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35,324,100
7	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	58 CC	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,312,084,801					2,427,689,041
7	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	78,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	82,687,500

7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	133,334,801	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	140,001,541
7	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit peralatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000
7	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000

7	1	1	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,050,000,000
7	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									51,424,779	53,996,020			
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,230,000
7	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	8,011,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,412,075
7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	1 Laporan	58 CC	30,813,279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32,353,945
7	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									498,110,950	523,016,498			

7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	6 Unit	58 CC	21,777,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22,865,850
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	23,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,026,750
7	1	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	5 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	52,498,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55,123,898

7	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	2 Unit	58 CC	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	210,000,000
7	1	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai Sakip	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 Unit	58 CC	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							407,867,140				428,260,498	
7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							204,994,750				215,244,488	
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	82	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	105,000,000

7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	82	104,994,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	110,244,488
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							202,872,390			213,016,010		
7	1	2	2	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	82	49,480,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	51,954,541
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai SKM	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	82	153,391,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	161,061,469

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						244,945,955		253,693,253				
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						74,945,955		78,693,253				
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah Lembaga	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	5 Lembaga	90 %	15,432,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,204,545
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90 %	59,513,055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	62,488,708
7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						110,000,000		115,000,000				
7	1	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah laporan pengembangan UKM	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	90 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	105,000,000

7	1	3	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						20,000,000					20,000,000		
7	1	3	2	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						40,000,000					40,000,000		
7	1	3	2	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000

7	1	3	2	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000

7	1	3	2	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000

7	1	3	2	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	3	2	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	15 Keluarga	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							222,493,945			233,618,642		
7	1	4	7		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							122,493,945			128,618,642		
7	1	4	7	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah laporan sub kegiatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	90,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	95,035,500
7	1	4	7	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah laporan sub kegiatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	31,983,945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	33,583,142

7	1	4	7		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							100,000,000					105,000,000	
7	1	4	7	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	105,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							269,902,605					283,397,735	
7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							269,902,605					283,397,735	
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	7,60	7,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	7,772,625

7	1	5	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	7,60	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,125,000
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	210,000,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220,500,110
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							156,468,140			160,291,547		
7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							156,468,140			160,291,547		
7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	43,433,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45,604,692

7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	17,602,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18,482,310
7	1	6	2	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	15,432,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	16,204,545
7	1	6	2	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7,60	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
TOTAL												6,718,605,508					7,053,035,788

Sumber : Rancangan akhir penetapan Renja SIPD Tahun 2023

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Banyuresmi mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Banyuresmi menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam rangka menyongsong tahun anggaran 2023, ada catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang diataranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pada tahun 2023 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-kabupaten Garut, dimana untuk kecamatan banyuresmi sesuai dengan data yang ada terdapat 2 Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu desa Sukakarya dan desa Cimareme.

2. Mulai masuknya tahapan kegiatan Pemilihan Umum Setentak.

Begitu pula kegiatan Pemilihan Umum Serentak, pada tahun 2023 akan memasuki tahapan awal dimana akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2024, sehingga perlu persiapan dan perencanaan yang matang dalam menyongsong pelaksanaannya.

5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan khususnya Kecamatan Banyuresmi terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus di ikuti dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan baik kaidah yang bersifat formal maupun kaidah yang bersifat non formal dimana salah satunya dan yang menjadi sandaran pokok adalah Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Kaidah-kaidah tersebut di jabarkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan kecamatan Banyuresmi dengan harapan visi misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

5.3 Rencana tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut dari catatan penting diatas, maka pada Rencana kerja kecamatan Banyuresmi tahun 2023 ini dituangkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukses tanpa ekses.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Banyuresmi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Banyuresmi mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Banyuresmi menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam rangka menyongsong tahun anggaran 2023, ada catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang diataranya adalah sebagai berikut :

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pada tahun 2023 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-kabupaten Garut, dimana untuk kecamatan banyuresmi sesuai dengan data yang ada terdapat 2 Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu desa Sukakarya dan desa Cimareme.

4. Mulai masuknya tahapan kegiatan Pemilihan Umum Setentak.

Begitu pula kegiatan Pemilihan Umum Serentak, pada tahun 2023 akan memasuki tahapan awal dimana akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2024, sehingga perlu persiapan dan perencanaan yang matang dalam menyongsong pelaksanaannya.

5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan khususnya Kecamatan Banyuresmi terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus di ikuti dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan baik kaidah yang bersifat formal maupun kaidah yang bersifat non formal dimana salah satunya dan yang menjadi sandaran pokok adalah Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Kaidah-kaidah tersebut di jabarkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan kecamatan Banyuresmi dengan harapan visi misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

5.3 Rencana tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut dari catatan penting diatas, maka pada Rencana kerja kecamatan Banyuresmi tahun 2023 ini dituangkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukses tanpa ekses.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Banyuresmi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN